



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	9&10

Tanggal			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

"Pemerintah tak bisa Urus Honorer!"

Honorer K2 Sumbar Ikut Demo Besar 30 Oktober

SUDIRMAN, METRO
 Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Sumbar mengancam akan terus melakukan demonstrasi yang lebih besar lagi bila tuntutan mereka tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tidak dipenuhi. Pasalnya, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, tidak relevan. Hal ini berimplikasi terhadap terbaikannya tenaga honor yang berada di atas usia tersebut.
 "Yang ada kini *kan* Permenpan Nomor 36 tahun 2018, membatasi usia di atas 35 tidak terakomodir untuk PNS. Atlet saja bisa di SK-kan untuk jadi PNS. Kenapa untuk honorer yang sudah mengabdikan puluhan tahun tidak bisa. Apa alasannya? Kalau tidak mampu mengurus honorer, pemerintah perlu menata kembali menteri-menteri itu," kata Ketua FHK2I Sumbar, Abuzar, Rabu (24/10).

Abuzar mengatakan, honorer Sumbar akan bergerak ke Jakarta. Mereka siap berdemonstrasi. Hal itu lantaran pemerintah tidak mengangkat mereka menjadi PNS. Pada aksi demo

» Ke Hal 10

"Pemerintah dari hal. 9

nanti, sebut Abuzar, pihaknya membawa serta spanduk dan poster untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.
 "Alhamdulillah sejauh ini untuk Sumbar siap mengirimkan utusan ke Jakarta. Kami terus berkoordinasi dengan para honorer yang ada di 17 kabupaten dan kota di Sumbar yang terdiri dari beragam profesi, diantaranya, guru, tenaga administrasi hingga tenaga medis. Kami akan menuntut untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil," kata Abuzar lagi.
 Sebelum rombongan besar honorer demo ke Jakarta, hingga saat ini sudah ada enam perwakilan K2 dari kabupaten

dan kota di Sumbar yang memastikan akan ikut aksi demo. Yaitu, dari Padang, Pesisir Selatan, Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, dan Pasaman Barat.
 Rencananya, pada 30 Oktober ini mereka akan bergabung dengan perwakilan honorer se-Indonesia untuk menemui KemenPAN-RB. Bila keputusannya baik dan terakomodir jadi PNS, tentunya tidak akan ada demo berikutnya.
 "Jika setelah aksi demo ini masih tidak ada regulasi atau peraturan mengenai pengangkatan, maka kami akan terus melakukan aksi demo dengan peserta yang lebih banyak. Kami ada tersebar di 17 kabupaten dan kota di Sumbar siap menuntut hak kami, PNS

harga mati, kami menolak P3K," tegas Abuzar.
 Lebih lanjut, kata Abuzar, tidak hanya mengirimkan massa untuk bergabung dengan rekan senasip di Jakarta, namun mereka juga telah mengantongi surat dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD di Sumbar. Baik dari kabupaten dan kota, hingga tingkat provinsi dukungan untuk terus memperjuangkan nasib honorer tersebut telah diperoleh.
 "Surat dukungan dari 17 kabupaten dan kota untuk pengangkatan honorer telah diperoleh, bahkan dari Gubernur, Wakil Gubernur dan DPRD Sumbar juga telah didapatkan dukungan untuk memperjuangkan nasib honorer ini," pungkasnya.
 Untuk diketahui, hingga saat ini tercatat 6.555 hon-

orer K2 yang belum diangkat jadi PNS yang tersebar di berbagai Kabupaten/Kota di Sumbar. Yakni, ada 449 orang di Kota Padang, 42 orang di Kota Bukittinggi, 876 orang di Kabupaten Padangpariaman, 221 orang di Kabupaten Tanahdatar, 250 orang di Kabupaten Limapuluh Kota, dan 491 orang di Kabupaten Agam.
 Berikutnya, 291 orang di Kabupaten Pasaman, 872 orang di Kabupaten Pesisir Selatan, 440 orang di Kabupaten Solok, 370 orang di Kabupaten Sijunjung, 112 orang di Kota Payakumbuh, 103 orang di Kabupaten Dharmasraya, 1.300 orang di Kabupaten Pasaman Barat, 47 orang di Kota Solok, 613 orang di Kabupaten Solok Selatan, dan 18 orang di Kota Sawahlunto. (mil)